

**PENGARUH AKUNTABILITAS KEUANGAN, PENGAWASAN  
KEUANGAN DAERAH, DAN TRANSPARANSI ANGGARAN  
TERHADAP PENGELOLAAN KEUANGAN PEMERINTAH  
DAERAH KABUPATEN INDRAGIRI HULU**

**Oleh :**

**Gerryan Putra**

**Pembimbing : Rasuli dan Eka**

*Faculty of Economics Riau University, Pekanbaru, Indonesia*

Email : [gerry\\_molon@yahoo.com](mailto:gerry_molon@yahoo.com)

*The Effects Of Financial Accountability, Regional Finance Oversight And  
Budget Transparency to The Local Government of Indragiri Hulu's  
Financial Management*

**ABSTRACT**

*This study aimed to examine the effect of financial accountability, oversight, and transparency of the budget to the financial management of the district government indragiri upstream Regional Work Units in the District Indragiri Upstream Research conducted on 23 local work unit, which consists of 15 offices and 8 agencies located in Indragiri Hulu in 2016. Data collected from 44 respondents further data were analyzed with SPSS version 2.0 using descriptive statistical analysis and multiple linear regression analysis to generate test classic assumptions, data analysis model, the coefficient of determination and prove the hypothesis. the results of this study showed no effect on the financial accountability of financial management, the H1 is rejected. While the t test to answer the hypothesis 2 shows that there is a positive influence on the financial control of the area of the financial management with a significance of 0.002 at  $p < 0.05$ . This shows that the area of financial supervision positive effect on financial management, this means that H2 is accepted. This means that if the supervision is good, controlled, and systematical, the financial management will be good too, while the t test to answer the hypothesis 3 shows that there is a positive effect of budget transparency on financial management with 0.000 significance at  $p < 0.05$ . This shows that the positive effect on the budget transparency, financial management, this means the H3 is accepted.*

*Keywords: financial accountability, supervision, transparency, management, and systematical*

**PENDAHULUAN**

Di era reformasi pengelolaan keuangan daerah sudah mengalami berbagai perubahan regulasi dari waktu ke waktu. Perubahan tersebut merupakan rangkaian bagaimana

suatu pemerintah daerah dapat menciptakan *good governance* dan *clean goverment* dengan melakukan tata kelola pemerintahan dengan baik. Keberhasilan dari suatu

pembangunan di daerah tidak terlepas dari aspek pengelolaan keuangan daerah yang dikelola dengan manajemen yang baik pula.

Pengelolaan Keuangan Daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan keuangan daerah. Pengelolaan keuangan daerah yang diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2013 pasal 3 meliputi kekuasaan pengelolaan keuangan daerah, azas umum dan struktur APBD, penyusunan rancangan APBD, penetapan APBD, penyusunan dan penetapan APBD bagi daerah yang belum memiliki DPRD, pelaksanaan APBD, perubahan APBD, pengelolaan kas, penatausahaan keuangan daerah, akuntansi keuangan daerah, pertanggungjawaban pelaksanaan APBD, pembinaan dan pengawasan pengelolaan keuangan daerah, kerugian daerah, dan pengelolaan keuangan BLUD. Pengelolaan keuangan daerah harus dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efektif, efisien, ekonomis, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan azas keadilan, kepatutan, dan manfaat untuk masyarakat.

Aspek penting yang harus dipertimbangkan dalam pengelolaan keuangan daerah adalah legalitas penerimaan dan pengeluaran daerah, serta pengelolaan keuangan secara baik, perlindungan aset fisik dan finansial, dan mencegah terjadinya pemborosan aset dan salah urus. Berdasarkan pandangan tersebut, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah merupakan satu

kesatuan yang tak dapat dipisahkan dalam upaya penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan masyarakat, dengan misi penting adalah peningkatan efisiensi dan efektifitas pengelolaan sumber daya keuangan dalam rangka peningkatan kesejahteraan dan pelayanan kepada masyarakat.

Fenomena yang dapat diamati dalam pengelolaan keuangan saat ini adalah menguatnya tuntutan akuntabilitas atas lembaga-lembaga publik, baik di pusat maupun daerah. Akuntabilitas dapat diartikan sebagai bentuk kewajiban mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan sebelumnya, melalui suatu media pertanggungjawaban yang dilaksanakan secara periodik (Stanbury, 2006).

Pengelolaan keuangan daerah Kabupaten Indragiri Hulu masih ditemukan permasalahan dalam anggaran yang digunakan oleh masing-masing kepala daerah dan SKPD terkait. Pemberian hibah tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Penerimaan hibah uang belum menyampaikan laporan pertanggung jawaban, pengadaan barang dan jasa yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku, terdapat indikasi inflasi, terdapat kegiatan yang dilaksanakan secara berkelanjutan, terdapat pengadaan obat, kelebihan stok, pengadaan jenis obat yang sudah ditarik, tetapi masih dilaksanakan dan wajib pajak tidak patuh dan masih banyak temuan-temuan lainnya yang didapat oleh BPKP dan KPK di daerah Indragiri Hulu. Ini adalah salah satu bentuk permasalahan-permasalahan yang ada dan harus diperbaiki ke depan

dan jangan sampai hal tersebut terulang kembali. (<http://www.riapos.co/94099-berita-bengkalis-dan-inhu-paling--ditemukan-banyak-permasalahan-pengelolaan-keuangan-daerah.html>.(2 Desember 2015)).

Indikasi penyimpangan dana APBD Indragiri Hulu senilai Rp.31,385 miliar terjadi pada kegiatan yang diusulkan oleh anggota DPRD yang tidak melalui mekanisme musrenbang, tetapi saat pembahasan APBD dengan total pekerjaan 185 paket. Penyimpangan yang merugikan keuangan daerah dan negara, ditemukan pada kegiatan yang diusulkan melalui dinas Pekerjaan Umum (PU) Kabupaten Inhu setelah KUA PPAS sebesar Rp.4.849.000,000,00,-

Bahkan didalam penganggaran belanja modal pada DPA dinas PU Inhu tahun anggaran 2015, meskipun pada lokasi kegiatan tanahnya belum dicatat sebagai aset Pemda, terdapat potensi kerugian negara sebesar Rp.950.000.000,00,-. (<http://www.harianberantas.co.id/2015/10/terkait-dugaan-korupsi-apbd-dan-bansos.html>.(24 Oktober 2015)).

Berdasarkan fenomena tersebut sehubungan dengan pelaksanaan akuntabilitas, pengawasan, transparansi, dan pengelolaan keuangan dapat dinyatakan bahwa pengelolaan keuangan pemerintah Kabupaten Indragiri Hulu masih belum seluruhnya memenuhi kriteria dalam menciptakan pemerintahan yang baik. Sehingga peneliti tertarik untuk meneliti hal apa saja yang mungkin mempengaruhi pengelolaan keuangan daerah.

Menurut penelitian yang dilakukan oleh Suparno (2012), akuntabilitas keuangan daerah tidak

berpengaruh terhadap pengelolaan keuangan daerah. Hasil ini berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Siregar (2011), memberikan bukti empiris bahwa akuntabilitas keuangan berpengaruh positif terhadap pengelolaan keuangan daerah. Hal ini membuat peneliti tertarik untuk meneliti kembali variabel akuntabilitas keuangan yang memberikan pengaruh terhadap pengelolaan keuangan daerah.

Selain akuntabilitas keuangan, pengawasan juga memberikan pengaruh terhadap pengelolaan keuangan daerah dimana pengawasan merupakan proses kegiatan yang ditujukan untuk menjamin agar pemerintah selaku pengelola keuangan daerah dapat berjalan sesuai dengan rencana ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Pengawasan diperlukan untuk mengetahui apakah perencanaan yang telah disusun sudah berjalan dengan efisien, efektif, dan ekonomis atau belum. Penelitian sebelumnya juga memberikan hasil yang berbeda, menurut Siregar (2011) pengawasan tidak berpengaruh terhadap pengelolaan keuangan daerah sementara hasil penelitian yang dilakukan oleh Suparno (2012) variabel pengawasan berpengaruh positif terhadap pengelolaan keuangan daerah.

Selain itu, dalam rangka meningkatkan pengelolaan keuangan daerah pemerintah harus terbuka atas semua informasi yang didapat serta melibatkan masyarakat. Keterbukaan informasi yang didapat dan keterlibatan publik dalam pengelolaan keuangan adalah awal perencanaan penyusunan APBD melalui musyawarah rencana pembangunan pada berbagai tingkat.

Pada saat musyawarah rencana pembangunan usulan pembangunan adalah berdasarkan pada skala prioritas yang langsung diusulkan oleh publik. Pelaksanaan dari musyawarah rencana pembangunan yang sudah disusun berdasarkan skala prioritas harus sesuai dengan usulan pada saat musyawarah rencana pembangunan. Semakin transparan pemerintah terhadap perencanaan pembangunan dan pengelolaan keuangan, maka semakin mudah untuk mewujudkan *good government*.

Penelitian mengenai hubungan transparansi dengan pengelolaan keuangan telah banyak dilakukan oleh peneliti sebelumnya, diantaranya adalah Siswandi (2013), Siregar (2011), dan Suparno (2012). Menurut penelitian yang dilakukan oleh Siswandi (2013) transparansi berpengaruh signifikan positif terhadap pengelolaan keuangan daerah. Hasil ini tidak sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Siregar (2011) dan Suparno (2012) yang memberikan bukti empiris bahwa transparansi tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap pengelolaan keuangan daerah. Sehingga peneliti tertarik untuk meneliti kembali variabel transparansi yang memiliki perbedaan hasil penelitian. Penelitian ini merupakan modifikasi dari penelitian yang dilakukan oleh Suparno (2012), Siregar (2011) dan Siswandi (2013). Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya terletak pada objek penelitian, tahun penelitian, dan variabel penelitian. Objek penelitian yaitu SKPD Kota Pematang Siantar Siregar (2011), Suparno (2012) meneliti di Dumai, dan Siswandi (2013) meneliti di Kota Medan.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka rumusan masalah yang diajukan adalah : 1) Apakah Akuntabilitas Keuangan berpengaruh terhadap Pengelolaan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Indragiri Hulu? 2) Apakah Pengawasan Keuangan Daerah berpengaruh terhadap Pengelolaan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Indragiri Hulu? 3) Apakah Transparansi Anggaran berpengaruh terhadap Pengelolaan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Indragiri Hulu?

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian ini adalah: 1) Pengaruh akuntabilitas keuangan terhadap pengelolaan keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Indragiri Hulu. 2) Pengaruh pengawasan keuangan daerah terhadap pengelolaan keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Indragiri Hulu. 3) Pengaruh transparansi anggaran terhadap pengelolaan keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Indragiri Hulu.

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi berbagai pihak, antara lain :

- 1) Penerapan dari ilmu yang telah diperoleh peneliti selama perkuliahan.
- 2) Memperluas wawasan, pengetahuan dan pengalaman penulis.
- 3) Meningkatkan kemampuan berfikir secara kritis dan sistematis dalam menghadapi permasalahan yang terjadi.
- 4) Bagi Lembaga Pendidikan Hasil ini diharapkan dapat menambah khasanah keilmuan dan sebagai bahan masukan bagi fakultas untuk mengevaluasi sejauh mana kurikulum yang diberikan mampu

memenuhi tuntutan perkembangan sektor publik.

5) Hasil ini juga diharapkan dapat dipergunakan sebagai bahan referensi untuk pengembangan selanjutnya.

6) Melalui penelitian ini, diharapkan dapat memberikan andil yang besar dalam memberikan kontribusi terhadap para pemangku kebijakan dalam menerapkan akuntansi sebagai optimalisasi pelayanan publik.

7) Hasil ini juga diharapkan dapat dipergunakan sebagai bahan referensi untuk pengembangan selanjutnya dan supaya dapat digunakan sebagai alternatif penerapan akuntansi pada sektor publik.

## **TELAAH PUSTAKA DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS**

### **Pengaruh Akuntabilitas Keuangan terhadap Pengelolaan Keuangan Daerah**

Akuntabilitas secara harfiah dalam bahasa Inggris biasa disebut dengan *accountability* yang diartikan sebagai “yang dapat dipertanggungjawabkan”. Atau dalam kata sifat disebut sebagai *accountable*. Lalu apa bedanya dengan *responsibility* yang juga diartikan sebagai “tanggung jawab”. Pengertian *accountability* dan *responsibility* seringkali diartikan sama. Padahal maknanya jelas sangat berbeda. Beberapa ahli menjelaskan bahwa dalam kaitannya dengan birokrasi, *responsibility* merupakan otoritas yang diberikan atasan untuk melaksanakan suatu kebijakan. Sedangkan *accountability* merupakan kewajiban untuk menjelaskan bagaimana realisasi otoritas yang diperolehnya tersebut.

Berkaitan dengan istilah akuntabilitas, Sirajudin H Saleh dan Aslam Iqbal (1995) berpendapat bahwa akuntabilitas merupakan sisi-sisi sikap dan watak kehidupan manusia yang meliputi akuntabilitas internal dan eksternal seseorang. Dari sisi internal seseorang akuntabilitas merupakan pertanggungjawaban orang tersebut kepada Tuhan-nya. Sedangkan akuntabilitas eksternal seseorang adalah akuntabilitas orang tersebut kepada lingkungannya baik lingkungan formal (atasan-bawahan) maupun lingkungan masyarakat.

Mengenai petunjuk akuntabilitas publik ditetapkan pengertian akuntabilitas yakni kewajiban-kewajiban dari individu-individu atau penguasa yang dipercayakan untuk mengelola sumber-sumber daya publik dan yang bersangkutan dengannya untuk dapat menjawab hal-hal yang menyangkut pertanggungjawaban fiskal, manajerial, dan program. Ini berarti bahwa akuntabilitas berkaitan dengan pelaksanaan evaluasi (penilaian) mengenai standard pelaksanaan kegiatan, apakah standar yang dibuat sudah tepat dengan situasi dan kondisi yang dihadapi, dan apabila dirasa sudah tepat, manajemen memiliki tanggung jawab untuk mengimplementasikan standard-standard tersebut.

Secara umum dalam setiap pengelolaan keuangan daerah selalu dikaitkan dengan akuntabilitas. Hal ini dapat dilihat dari definisi akuntabilitas yang merupakan hal yang penting untuk menjamin efisiensi dan efektivitas. Keterkaitan atau pentingnya akuntabilitas dengan pengelolaan keuangan dapat dilihat bahwa akuntabilitas dengan seberapa baik prosedur hukum yang diikuti

untuk membentuk keputusan administrasi publik yang harus dihormati oleh para pegawai negeri sipil dan otoritas publik. Akuntabilitas mencakup eksistensi dari suatu mekanisme yang meyakinkan politisi dan pejabat pemerintahan terhadap aksi perbuatannya dalam menggunakan sumber-sumber publik dan kinerja prilakunya. Akuntabilitas juga berkaitan erat dengan pertanggungjawaban terhadap efektivitas kegiatan dalam pencapaian sasaran atau target kebijaksanaan atau program.

Menurut penelitian yang dilakukan oleh Suparno (2012), akuntabilitas keuangan daerah berpengaruh negatif terhadap pengelolaan keuangan daerah. Hal ini berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Siswandi (2013) dan Magdalena (2014), Siswandi dan Magdalena menemukan bukti empiris bahwa akuntabilitas memiliki pengaruh positif terhadap pengelolaan keuangan daerah kota Medan. Hasil ini juga sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Siregar (2011), memberikan bukti empiris bahwa akuntabilitas keuangan berpengaruh positif terhadap pengelolaan keuangan daerah. Berdasarkan fenomena diatas peneliti menduga bahwa ada pengaruh akuntabilitas keuangan terhadap pengelolaan keuangan daerah. Sehingga hipotesis yang dapat diambil adalah :

*H1 : Diduga Akuntabilitas Keuangan berpengaruh terhadap Pengelolaan Keuangan Daerah*

### **Pengaruh Pengawasan Keuangan Daerah Terhadap Pengelolaan Keuangan Daerah**

Pengawasan adalah pengukuran kinerja dan pengambilan tindakan untuk menjamin hasil yang diinginkan. Merupakan peran penting dan positif dalam proses manajemen, menjamin segala sesuatu berjalan sebagaimana mestinya dan sesuai waktunya.

Pengawasan diperlukan untuk mengetahui apakah perencanaan yang telah disusun dalam APBD dapat berjalan secara efisien, efektif, dan ekonomis. Memastikan bahwa segala sesuatunya berjalan sesuai dengan mandat, visi, misi, tujuan serta target-target operasi organisasi. Mengetahui tingkat akuntabilitas kinerja tiap instansi yang akan dijadikan parameter penilaian keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.

Pengawasan pemerintah daerah adalah proses kegiatan yang ditujukan untuk menjamin agar pemerintah daerah berjalan sesuai dengan rencana ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Peraturan Presiden RI Nomor 192 Tahun 2014 tentang Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan. BPKP merupakan aparat pengawas intern pemerintah yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden. Berdasarkan Perpres tersebut, BPKP mempunyai tugas utama menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pengawasan keuangan negara/daerah dan pembangunan nasional. Untuk menyelenggarakan tugas dan fungsi di daerah, BPKP membentuk Kantor Perwakilan BPKP di setiap Provinsi

Pengawasan keuangan adalah proses kegiatan yang ditujukan untuk menjamin agar pemerintah daerah

berjalan sesuai dengan rencana ketentuan yang telah ditentukan. Pengawasan keuangan daerah perlu untuk mengetahui apakah perencanaan yang telah disusun sudah berjalan dengan efektif, efisien, dan ekonomis atau belum.

Pengawasan juga memberikan pengaruh terhadap pengelolaan keuangan daerah dimana pengawasan merupakan proses kegiatan yang ditujukan untuk menjamin agar pemerintah selaku pengelola keuangan daerah dapat berjalan sesuai dengan rencana ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Penelitian sebelumnya juga memberikan hasil yang berbeda, menurut Siregar (2011) dan Magdalena (2014) memberikan bukti empiris bahwa pengawasan berpengaruh negatif terhadap pengelolaan keuangan daerah sementara hasil penelitian berbeda yang dilakukan oleh Suparno (2012) variabel pengawasan berpengaruh positif terhadap pengelolaan keuangan daerah.

Berdasarkan fenomena tersebut diatas, peneliti menduga bahwa ada pengaruh antara pengawasan keuangan. Sehingga hipotesis yang diangkat adalah sebagai berikut :

*H2 : Diduga Pengawasan Keuangan Memiliki Pengaruh Terhadap Pengelolaan Keuangan Daerah*

### **Pengaruh Transparansi Anggaran Terhadap Pengelolaan Keuangan Daerah**

Transparansi bermakna tersedianya informasi yang cukup, akurat, dan tepat waktu tentang kebijakan publik, dan proses pembentukannya. Informasi adalah suatu kebutuhan penting masyarakat untuk berpartisipasi dalam

pengelolaan keuangan daerah. Dengan ketersediaan informasi, masyarakat dapat sekaligus mengawasi sehingga kebijakan publik yang muncul bisa memberikan hasil optimal bagi masyarakat, serta mencegah terjadinya kecurangan dan manipulasi yang akan menguntungkan salah satu kelompok masyarakat.

Menurut Siswandi (2013) dan Siregar (2011) anggaran disusun oleh pihak eksekutif dikatakan transparan jika memenuhi criteria berikut ini :

- 1) Terdapat pengumuman kebijakan anggaran
- 2) Tersedianya dokumen anggaran dan mudah diakses
- 3) Tersedia laporan pertanggungjawaban yang tepat waktu
- 4) Terdapat sistem pemberian informasi kepada publik

Dalam rangka meningkatkan pengelolaan keuangan daerah pemerintah harus terbuka atas semua informasi yang didapat serta melibatkan masyarakat. Keterbukaan atau informasi yang didapat dan keterlibatan publik dalam pengelolaan keuangan adalah awal perencanaan penyusunan APBD melalui musyawarah rencana pembangunan (musrenbang) pada berbagai tingkat.

Pada saat musyawarah rencana pembangunan usulan pembangunan adalah berdasarkan pada skala prioritas yang langsung diusulkan oleh publik. Pelaksanaan dari musyawarah rencana pembangunan yang sudah disusun berdasarkan skala prioritas harus sesuai dengan usulan pada saat musyawarah rencana pembangunan. Semakin transparan pemerintah terhadap perencanaan pembangunan

dan pengelolaan keuangan, maka semakin mudah untuk mewujudkan *good government*.

Menurut penelitian yang dilakukan oleh Siswandi (2013) transparansi berpengaruh signifikan positif terhadap pengelolaan keuangan daerah. Hasil ini tidak sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Siregar (2011) dan Suparno (2012) yang memberikan bukti empiris bahwa transparansi tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap pengelolaan keuangan daerah, sehingga peneliti menduga ada pengaruh antara transparansi terhadap pengelolaan keuangan daerah. Hipotesis yang dapat diangkat adalah sebagai berikut :

*H3 : Diduga Transparansi Anggaran Berpengaruh Terhadap Pengelolaan Keuangan Daerah*

## **METODE PENELITIAN**

Populasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah pegawai negeri sipil yang bekerja pada satuan kerja perangkat daerah Kabupaten Indragiri Hulu, yang terdiri dari 15 Dinas dan 8 Badan. Metode pengambilan sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah *purposive sampling*, yaitu teknik penentuan sampel dengan pertimbangan tertentu. Populasi yang menjadi sampel yaitu kepala sub bagian keuangan dan dua orang staf sub bagian keuangan Satuan perangkat kerja Pemerintah Kabupaten Indragiri Hulu. Jadi jumlah sampel adalah 82 orang. Teknik pengumpulan data primer pada penelitian ini adalah dengan cara membagikan kuesioner kepada kepala sub bagian keuangan dan staf sub bagian keuangan Satuan perangkat kerja Kabupaten Indragiri

Hulu yang dijadikan sampel dalam penelitian.

## **Metode Analisis Data**

Metode analisis data yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah metode deskriptif kualitatif, yaitu metode yang dilakukan dengan cara mengumpulkan data, menyusun, dan mendeskripsikan sehingga diperoleh hasil berupa gambaran yang jelas tentang perkembangan akuntansi akrual terkait dengan latar belakang kemunculan dan proses penerapannya di sektor publik, proses penerapannya akuntansi basis akrual pada sektor publik dalam sistem pemerintahan di Indonesia, peluang, tantangan dan strategi dari penerapan basis akrual dalam sistem pemerintahan Indonesia.

Didalam penelitian terlebih dahulu dilakukan uji asumsi klasik, kemudian dilakukan uji validitas dan uji reabilitas. Uji asumsi klasik terdiri dari uji Normalitas, uji Multiko-linearitas dan uji Heteroskedastisitas. Teknik analisis data menggunakan analisis deskriptif dan metode analisis yang digunakan adalah regresi berganda, Uji koefisien determinasi, dan Uji t.

## **Definisi Operasional Variabel**

Variabel dependen dalam penelitian ini diadopsi dari penelitian Siregar (2011) dan Suparno (2012), dan sebagian kuisisioner peneliti tambah atau kurang sesuai judul yang peneliti ambil, diukur dengan indikator sebagai berikut :

1) Seluruh kegiatan pengelolaan keuangan daerah (perencanaan, pelaksanaan, pertanggungjawaban, penatausahaan, pelaporan, dan pengawasan keuangan) telah dilaksanakan dan disajikan dengan



baik dan benar serta secara ekonomi, efisien, efektif, juga adil dan merata

2) Pengawasan keuangan daerah atas pengelolaan keuangan daerah oleh atasan langsung, fungsional (lembaga pengawas intern pemerintah maupun ekstern) dilaksanakan dengan baik

3) Pelaksanaan *good governance* yang mengarah pada pada transparansi, akuntabilitas, *fairness*, dan *responsibility*

4) Pelaksanaan pengelolaan keuangan daerah secara terbuka, jujur, akuntabel, ekonomis, efisien, dan efektif

Variabel akuntabilitas keuangan dalam penelitian ini peneliti adopsi dari penelitian Siregar (2011) dan Suparno (2012), dan sebagian kuisisioner peneliti tambah atau kurangi sesuai judul yang peneliti ambil, diukur dengan indikator, yaitu :

1) Penetapan Renstrada (rencana dan strategi daerah) dan azas umum pengelolaan daerah

2) Pelaksanaan musrenbang (musyawarah perencanaan dan pengembangan daerah yang melibatkan semua unsur masyarakat

3) Pertimbangan utama dalam pengelolaan keuangan daerah adalah kepentingan publik dan golongan

4) Pertanggungjawaban pemerintah atas kebijakan publik melalui laporan pertanggungjawaban

5) Kesempatan yang seluas-luasnya bagi masyarakat untuk menilai kinerja pemerintah

6) Indikator hasil kinerja untuk evaluasi pengelolaan keuangan daerah

7) Pengawasan terhadap proses dan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan daerah

8) Perhitungan *cost and benefit analysis* yang tak terbatas dalam

perencanaan pengelolaan keuangan daerah

9) Memiliki prosedur hukum dan pedoman pengelolaan keuangan daerah

Variabel Pengawasan Keuangan Daerah, Kuisisioner dalam penelitian ini peneliti adopsi dari penelitian Siregar (2011) dan Suparno (2012), dan sebagian kuisisioner peneliti tambah atau kurangi sesuai judul yang peneliti ambil, diukur dengan indikator sebagai berikut :

1) Pengelolaan atau optimalisasi seluruh sumber daya yang mampu memberikan penerimaan, pendapatan, dan atau penghematan telah dilakukan oleh pemerintah daerah

2) Metode pengelolaan, pembukuan, dan pengawasan keuangan daerah telah diperbaiki oleh pemerintah daerah

3) Pengawasan pengelolaan keuangan daerah dilakukan oleh itwilkot (inspektorat wilayah kota) sebagai pengawas intern dan BPK sebagai pengawas ekstern pemerintah

4) Pelaksanaan pengawasan keuangan daerah dengan pengawasan atasan langsung berdasarkan metode pengawasan pengelolaan keuangan daerah, pengawasan fungsional, dan pengawasan melekat

5) Pengawasan dan pengendalian untuk kesejahteraan seluruh masyarakat

6) Anggaran sektor publik digunakan untuk mengendalikan (membatasi kekuasaan ) eksekutif dan didasari prinsip-prinsip ekonomis, efisien, dan efektif

7) Audit operational, audit manajemen, dan audit kinerja dilakukan oleh audit intern

8) Pengawasan keuangan daerah dilakukan oleh DPRD dan mengarah untuk menjamin pencapaian sasaran

yang telah ditetapkan dalam peraturan daerah tentang APBD

9) Pembinaan meliputi pemberian pedoman, bimbingan, supervisi, konsultasi, pendidikan, dan pelatihan dalam melaksanakan pengawasan pengelolaan keuangan daerah

10) Kelalaian atau perbuatan melanggar hukum oleh aparatur pemerintah yang merugikan keuangan daerah diselesaikan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan dan dilaporkan kepada BPK paling lama tujuh hari setelah kerugian diketahui.

Variabel independen yang lainnya adalah transparansi anggaran. Transparansi bermakna tersedianya informasi yang cukup, akurat, dan tepat waktu tentang kebijakan publik, dan proses pembentukannya. Informasi adalah suatu kebutuhan penting masyarakat untuk berpartisipasi dalam pengelolaan keuangan daerah. Dengan ketersediaan informasi, masyarakat dapat sekaligus mengawasi sehingga kebijakan publik yang muncul bisa memberikan hasil yang optimal bagi masyarakat, serta mencegah terjadinya kecurangan dan manipulasi yang hanya akan menguntungkan salah satu kelompok masyarakat saja secara tidak proporsional.

Instrumen pengukurannya adalah: keterbukaan pemerintah dalam melaksanakan pengelolaan keuangan daerah, sehingga dapat diawasi oleh DPRD dan masyarakat, Siregar (2011) dan Suparno (2012).. Pengukuran variabel ini menggunakan instrumen kuisisioner dengan skala 5 point untuk menunjukkan bahwa seberapa jauh transparansi telah dilaksanakan

dalam pengelolaan pengelolaan keuangan daerah.

## **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

### **Kuesioner dan Demografi**

Data penelitian diperoleh dari kuisisioner yang disebarkan ke 82 responden. Namun yang mengembalikan kuisisioner dan yang memenuhi karakteristik data penelitian didapat sebanyak 44 kuisisioner.

### **Hasil Statistik Deskriptif**

Hasil pengukuran statistik deskriptif terhadap variabel dari 44 responden. Variabel akuntabilitas keuangan (X1) terdiri dari 9 buah pertanyaan pada skala Likert 5 poin. Nilai mean akuntabilitas keuangan sebesar 36,68. Pengawasan keuangan daerah (X2) terdiri dari 10 buah pertanyaan pada skala Likert 5 poin. Nilai mean pengawasan keuangan daerah sebesar 41,72. Transparansi Anggaran (X3) terdiri dari 10 buah pertanyaan pada skala Likert 5 poin. Nilai mean transparansi anggaran sebesar 41,20. Pengelolaan keuangan daerah terdiri dari 8 pertanyaan pada skala Likert 5 poin. Nilai mean pengelolaan keuangan sebesar 29,14.

Sedangkan standar deviasi untuk masing-masing variabel adalah akuntabilitas keuangan sebesar 4,027; pengawasan keuangan daerah sebesar 3,506; transparansi anggaran sebesar 4,771; dan pengelolaan keuangan sebesar 4,222. Semakin tinggi tingkat standar deviasinya maka akan semakin heterogenitas, yang berarti pernyataan dalam variabel tersebut semakin bervariasi. Semakin rendah tingkat standar deviasinya maka semakin homogen

artinya bahwa variasi jawaban atau pernyataan semakin kecil.

### Hasil Uji Kualitas Data

#### Hasil Uji Validitas Data

Uji validitas digunakan untuk mengukur valid atau tidaknya suatu kuesioner. Teknik yang digunakan untuk mengukur validitas pertanyaan/pernyataan kuisisioner adalah Korelasi Product Moment dari Karl Pearson dengan ketentuan : Jika  $r_{hitung} > r_{tabel}$  , maka skor butir pertanyaan/pernyataan kuisisioner valid tetapi sebaliknya jika  $r_{hitung} < r_{tabel}$  maka skor butir pertanyaan/pernyataan kuisisioner tidak valid.

Penelitian menunjukkan bahwa variabel akuntabilitas keuangan, pengawasan keuangan daerah, transparansi anggaran, serta pengelolaan keuangan memiliki kriteria valid untuk setiap item pertanyaan dengan nilai signifikansi  $r_{hitung} > r_{tabel}$ . Hal ini berarti menyatakan bahwa setiap item pertanyaan yang digunakan dalam penelitian ini mampu mengungkapkan sesuatu yang diukur pada kuesioner tersebut.

#### Hasil Uji Normalitas Data

Dari hasil pengujian normalitas data menunjukkan bahwa nilai Asymptotic Significance Kolmogrov-Smirnov (K-S) lebih besar dari  $\alpha 5\%$ . Dengan demikian dapat dijustifikasi bahwa keseluruhan data yang digunakan dalam penelitian ini berdistribusi secara normal.

#### Hasil Uji Reliabilitas Data

Hasil uji reliabilitas dalam penelitian ini ditunjukkan pada Tabel 1 berikut ini:

**Tabel 1**  
**Hasil Uji Realibilitas**

Variabel	Cronbach's Alpha	Keterangan
Akuntabilitas Keuangan	0,780	Reliable
Pengawasan Keuangan Daerah	0,601	Reliable
Transparansi Anggaran	0,792	Reliable
Pengelolaan Keuangan	0,815	Reliable

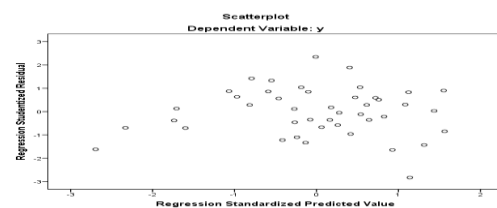
Sumber : Data Olahan, 2016

Dari hasil uji reliabilitas menunjukkan nilai *Cronbach's Alpha* atas variabel akuntabilitas keuangan sebesar 0,780; pengawasan keuangan daerah sebesar 0,601; transparansi anggaran sebesar 0,792; serta pengelolaan keuangan sebesar 0,815. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa pernyataan dalam kuesioner ini *reliabel* karena mempunyai *Cronbach's Alpha*  $> 0,60$ . Hal ini menunjukkan bahwa setiap item pernyataan yang digunakan akan mampu memperoleh data yang konsisten yang berarti bila pernyataan itu diajukan kembali akan diperoleh jawaban yang relatif sama dengan jawaban sebelumnya.

### Pengujian Asumsi Klasik

#### Hasil Uji Heteroskedastisitas Data

**Gambar 1**  
**Hasil Uji Heteroskedestisitas**



Sumber : Data olahan, 2016

Dari Gambar 1 grafik *Scatterplot* di atas, terlihat bahwa titik-titik tidak membentuk pola tertentu dan menyebar pada sumbu Y. Jadi, dapat disimpulkan bahwa model regresi dalam penelitian ini tidak terdapat heteroskedastisitas

#### **Hasil Uji Multikolinieritas Data**

Dari hasil uji multikolinieritas yang dilakukan, hasil perhitungan nilai tolerance menunjukkan tidak ada variabel bebas yang memiliki nilai tolerance kurang dari 0,1. Hasil perhitungan nilai VIF juga menunjukkan hal yang sama tidak ada satu variabel bebas yang memiliki nilai VIF lebih dari 10. Jadi dapat disimpulkan bahwa tidak ada multikolinieritas antar variabel bebas dalam model regresi.

#### **Hasil Uji Koefisien Determinasi (Adjusted R<sup>2</sup>)**

Hasil uji persamaan regresi yang digunakan untuk mengetahui pengaruh akuntabilitas keuangan, pengawasan keuangan daerah, dan transparansi anggaran terhadap pengelolaan keuangan menunjukkan nilai R<sup>2</sup> sebesar 0,838. Hal ini berarti 83,80% variabel pengelolaan keuangan dapat dijelaskan oleh variabel akuntabilitas keuangan, pengawasan keuangan daerah, dan transparansi anggaran. Sedangkan sebesar 16,20% dijelaskan oleh variabel lain di luar yang diteliti.

#### **Hasil Pengujian Hipotesis**

Hipotesis yang diajukan adalah untuk menguji apakah akuntabilitas keuangan, pengawasan keuangan daerah, dan transparansi anggaran berpengaruh secara langsung terhadap pengelolaan keuangan.

Hasil t test memperlihatkan bahwa variabel akuntabilitas keuangan (x1) tidak signifikan di atas 0,05 dengan probabilitasnya sebesar 0,175. Dengan demikian, hasil penelitian ini menunjukkan tidak adanya pengaruh akuntabilitas keuangan terhadap pengelolaan keuangan, maka H1 ditolak. Hasil penelitian ini konsisten dengan penelitian yang dilakukan Peggy Sande (2013) yang menyatakan bahwa tidak adanya pengaruh signifikan tersebut dapat dikarenakan berbagai hal diantaranya belum maksimalnya pemanfaatan suatu sistem akuntansi dan sistem anggaran yang dapat menjamin bahwa pengelolaan keuangan daerah dilakukan secara konsisten sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku serta pengeluaran keuangan daerah yang dilakukan belum berorientasi pada pencapaian visi, misi, tujuan, sasaran dan hasil (manfaat) yang akan dicapai.

Sedangkan hasil t test untuk menjawab hipotesis 2 menunjukkan bahwa ada pengaruh positif pengawasan keuangan daerah terhadap pengelolaan keuangan dengan signifikansi 0,002 pada  $p < 0,05$ . Hal ini menunjukkan bahwa pengawasan keuangan daerah berpengaruh terhadap pengelolaan keuangan, ini berarti H2 diterima. Artinya jika pengawasan di dalam suatu SKPD baik, terkontrol, tersistem maka pengelolaan keuangannya akan baik pula.

Sementara hasil t test untuk menjawab hipotesis 3 menunjukkan bahwa transparansi anggaran berpengaruh terhadap pengelolaan keuangan dengan signifikansi 0,000 pada  $p < 0,05$ . Hal ini menunjukkan bahwa H3 diterima.

## **SIMPULAN DAN SARAN**

### **Simpulan**

Berdasarkan pada bab-bab sebelumnya, maka dapat diperoleh simpulan sebagai berikut :

1) Akuntabilitas keuangan tidak berpengaruh terhadap pengelolaan keuangan daerah. Ketidakadanya pengaruh signifikan tersebut dapat dikarenakan berbagai hal diantaranya belum maksimalnya pemanfaatan suatu sistem akuntansi dan sistem anggaran yang dapat menjamin bahwa pengelolaan keuangan daerah dilakukan secara konsisten sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta pengeluaran keuangan daerah yang dilakukan belum berorientasi pada pencapaian visi, misi, tujuan, sasaran dan hasil (manfaat) yang akan dicapai.

2) Pengawasan keuangan berpengaruh positif dan signifikan terhadap pengelolaan keuangan. Artinya jika pengawasan di dalam suatu SKPD baik, terkontrol, dan tersistem maka pengelolaan keuangannya akan baik pula

3) Transparansi berpengaruh positif terhadap pengelolaan keuangan daerah. Artinya jika dalam transparansi pengelolaannya baik, maka akan baik pula pengelolaan keuangan suatu SKPD.

### **Saran**

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam mempengaruhi implikasi berbagai bidang, dibawah ini dibahas kontribusi dan implikasi tersebut, yaitu :

1) Bagi ilmu pengetahuan

Penelitian ini merupakan aplikasi mengenai hubungan antara akuntabilitas keuangan, transparansi

anggaran, dan transparansi anggaran terhadap pengelolaan keuangan daerah. Dalam proses pengembangan ilmu pengetahuan hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi yang lebih baik dalam pengembangan ilmu dalam bidang akuntansi dan khususnya bidang penganggaran dan pengelolaannya pada satuan kerja perangkat daerah di seluruh Indonesia.

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pada penelitian berikutnya. Para peneliti berikutnya dapat menggunakan hasil penelitian ini, dan juga hasil penelitian-penelitian lainnya, sebagai dasar replikasi untuk penelitian berikutnya. Para peneliti berikutnya dapat juga meneliti mengenai hubungan akuntabilitas keuangan, pengawasan keuangan daerah, dan transparansi anggaran terhadap pengelolaan keuangan daerah dan juga menggunakan variabel-variabel lainnya yang mungkin mempengaruhi pengelolaan keuangan.

Berdasarkan keterbatasan dalam penelitian diatas, maka saran peneliti kepada peneliti selanjutnya adalah penggunaan selain metode survey (kuesioner) seperti metode interview dapat digunakan untuk mendapatkan komunikasi dua arah dengan subyek dan mendapatkan kejujuran jawaban subyek, memperluas cakupan sampel dan populasi yang digunakan, Penelitian selanjutnya dapat dilakukan dengan menggunakan variabel-variabel lain yang diduga juga dapat mempengaruhi pengelolaan keuangan. misalnya seperti menambahkan variabel standar akuntansi pemerintahan, dan transparansi serta menambahkan variabel intervening yang mungkin

bisa memediasi hubungan antara variabel yang mempengaruhi pengelolaan keuangan.

2) Bagi pihak Pemerintah atau regulator

Hasil penelitian ini dapat dijadikan masukan bagi pemerintah atau regulator khususnya mengenai pengelolaan keuangan dan penerapannya serta pengaruhnya terhadap kinerja pemerintah daerah untuk kedepannya. Diharapkan dengan adanya pengelolaan keuangan yang baik akan memberikan dampak positif terhadap kinerja pemerintah sehingga akan tercipta pemerintahan yang baik dan tata kelola pemerintahan yang baik.

3) Bagi Satuan Kerja Perangkat Daerah

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan responden pada khususnya mengenai hubungan akuntabilitas keuangan, pengawasan keuangan daerah, dan transparansi anggaran terhadap pengelolaan keuangan khususnya yang diterapkan di sektor pemerintahan yang ada di Kabupaten Indragiri Hulu. Informasi mengenai penerapan akuntabilitas keuangan, pengawasan keuangan, dan transparansi anggaran terhadap pengelolaan keuangan daerah oleh satuan kerja perangkat daerah di Kabupaten Indragiri Hulu diharapkan dapat menunjukkan bahwa organisasi sektor pemerintah tersebut dikelola dengan baik sehingga dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat karena telah menerapkan penganggaran yang baik.

4) Bagi masyarakat

Peran aktif dari masyarakat sangat perlu ditingkatkan lagi terkait pengelolaan keuangan daerah. Karena untuk membentuk suatu pemerintahan yang baik dengan

pengelolaan yang baik pula maka diperlukan juga partisipasi masyarakat didalamnya terkait dengan anggaran dan pengelolaannya. Karena anggaran merupakan uang dan hak rakyat selaku pengguna layanan publik.

## DAFTAR PUSTAKA

Magdalena, Tiur. 2014. *Pengaruh Akuntabilitas Publik, Transparansi Publik, dan Pengawasan Terhadap Pengelolaan Apbd (Studi Kasus Pada Pemerintah Kabupaten Deli Serdang)*. Skripsi Mahasiswa Jurusan Akuntansi Pemerintahan Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Medan.

Saleh, Sirajudin H & Aslam Iqbal. 1995. *Accountability The Endless Prophecy*. Asian and Pacific Development Centre

Sande, Peggy. (2013). "Pengaruh Penyajian Laporan Keuangan Dan Aksesibilitas Laporan Keuangan Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah". Skripsi. Padang: Universitas Negeri Padang

Siregar, Liper. 2011. *Pengaruh Akuntabilitas Publik, dan Transparansi Publik dan Pengawasan Terhadap Pengelolaan APBD Dengan Standar Akuntansi Pemerintahan Sebagai Variabel Moderator Pada Pemerintah Kota Pematangsiantar*. Tesis

- Mahasiswa Universitas  
Negeri Medan.
- Siswandi. 2013. *Pengaruh Partisipasi, Akuntabilitas, Transparansi, Serta Efektivitas dan Efisiensi dalam Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Medan Provinsi Sumatera Utara*. Skripsi Mahasiswa Jurusan Akuntansi Pemerintahan Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Medan.
- Stanbury, P. F. Dan Whitaker. (2006). *Principle of Fermentation Technology*. Pergamon Press, Ltd., Oxford
- Suparno. 2012. *Pengaruh Akuntabilitas Keuangan Daerah, Value For Money, Kejujuran, Transparansi, dan Pengawasan Terhadap Pengelolaan Keuangan*. Tesis Mahasiswa Universitas Negeri Medan.